

POLA HUTAN RAKYAT PADA PROGRAM *TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION* (TFCA-SUMATERA) DI BENGKULU

Patterns of Community Forests in Tropical Forest Conservation Action Program-Sumatera (TFCA-Sumatera) in Bengkulu

Mike Dwi Hisma, Hardjanto dan Yulius Hero

Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga, Bogor-16680

E-mail: mikedwihisma@rocketmail.com

ABSTRACT

The United States Government and the Indonesian Government have agreed on a treaty to reduce deforestation called the TFCA Sumatra Program (Tropical Forest Conservation Action-Sumatera). Development of community forests is expected to reduce the rate of deforestation. However, the pattern of effective community forest management to be applied in reducing the rate of deforestation in Sumatera was unknown, especially in the TFCA program in Bengkulu. The study was conducted in Air Sulau Village and Kayu Ajaran Village, South Bengkulu Regency. The respondents selection was conducted by purposive sampling. This study aimed to analyze the pattern of community forest management in the TFCA Sumatera in Bengkulu. The data was collected using observations, interviews, and literature study. The analysis was performed using descriptive-qualitative and quantitative methods. The results showed that the pattern of development community forests in the TFCA program in Bengkulu was agroforestry with predominantly agricultural crops such as rubber. Meanwhile, woody plants such as albizia have just been developed on community forest enterprises in Bengkulu, combined with seasonal crops such as cassava and maize, or with herbs like turmeric and ginger. Based on the fund sources, the community forest pattern in TFCA Sumatera in Bengkulu belongs to the community forest pattern with full subsidy.

Keywords: *Community forests, TFCA-Sumatera, agroforestry, development patterns*

PENDAHULUAN

Sumatra Bagian Selatan dengan hutan tropisnya mengalami kehilangan luasan hutan sejak tahun 1970-an akibat berbagai kegiatan pertanian (Gaveau *et al.* 2007), perluasan pemukiman (Uriarte *et al.* 2010), serta berbagai tekanan baik lokal maupun regional (Geist *et al.* 2002). Hal ini menunjukkan perlunya upaya perlindungan atau penyelamatan keanekaragaman hayati di Sumatera. Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian untuk melestarikan hutan tropis di Sumatera. Perjanjian tersebut disebut Program TFCA Sumatera (*Tropical Forest Conservation Action-Sumatra*). (TFCA 2014)

Kegiatan konservasi, perlindungan, restorasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan tropis secara lestari di Pulau Sumatera merupakan kegiatan yang dirancang dalam program TFCA Sumatera. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) melewati Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari kawasan prioritas program TFCA Sumatera TNBBS yang mengalami kehilangan hutan (deforestasi) sejak pembentukannya. Hal ini dikarenakan penggundulan hutan dan penebangan hutan belum dihentikan di areal batas lindung Sumatera (Gaveau *et al.* 2009).

Kawasan hutan pada koridor TNBBS-TNKS di Provinsi Bengkulu terletak memanjang di jajaran bukit barisan Sumatera. Konsorsium Ulayat yang terdiri dari

Yayasan Ulayat dan Yayasan Konservasi Sumatera pada program TFCA Sumatera, mengembangkan pemberdayaan masyarakat pada desa site yang tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Lima desa menggunakan skema pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM), satu desa mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat, dan satu desa dengan skema pengelolaan hutan rakyat.

Sementara itu, luasan hutan rakyat di Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan pesat mulai dari tahun 2008 hingga 2012 (Kemenhut 2013). Hal ini menunjukkan perkembangan hutan rakyat semakin menjadi perhatian masyarakat. Disamping itu, semakin meningkatnya pasar dan harga kayu diharapkan pengembangan hutan rakyat dapat meningkatkan penghasilan petani hutan rakyat yang juga akan meningkatkan perekonomian wilayah. Akan tetapi, data statistik kehutanan Kemenhut (2013) menunjukkan pengembangan hutan rakyat hanya sebesar 5 persen dari luas kawasan hutan yang ada di Bengkulu. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan hutan rakyat di Bengkulu untuk ditingkatkan.

Maryudi *et al.* (2012) menyatakan bahwa penggunaan hutan secara langsung dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu pemanfaatan langsung hutan oleh masyarakat adalah dengan dibangunnya hutan rakyat yang dapat memberikan kontribusi dari sisi ekonomis, ekologis maupun sosial. Pola pengembangan HR yang memberikan

manfaat maksimal adalah pola agroforestri (Arifin *et al.* 2012).

Pola hutan rakyat menurut pola tanamnya terdiri tiga pola, yaitu: hutan rakyat murni, hutan rakyat campuran, dan hutan rakyat dengan sistem agroforestri (Hardjanto 2003). Ada tiga pola pengembangan hutan rakyat hingga saat ini yaitu pola subsidi (inpres, padat karya), pola swadaya dan pola kemitraan.

Pengembangan hutan rakyat pada program TFCA Sumatera yang dilakukan di Provinsi Bengkulu merupakan satu-satunya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada lahan milik. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, kesehatan, pelestarian dan meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan hutan (Tiwari *et al.* 2010) serta memberikan keberlanjutan mata pencaharian (Taylor 2010). Selain itu, pengembangan hutan rakyat terutama dengan pola agroforestri dapat berkontribusi terhadap upaya konservasi hutan berbasis masyarakat (Martini *et al.* 2012). Oleh karena perlu dilakukan penelitian mengenai pola hutan rakyat yang efektif dikembangkan pada program TFCA-Sumatera di Bengkulu.

Selain itu, kegiatan konversi hutan alam yang bersamaan dengan eksploitasi hutan alam secara berlebihan telah menyebabkan tingginya tingkat deforestasi hutan di Indonesia. Upaya pemanfaatan lahan terutama lahan negara yang mengalami kerusakan akibat deforestasi telah dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan baik sebagai HTR, Hkm, KBR, dan program lainnya (Minang *et al.* 2007). Kegiatan perlindungan kawasan hutan lindung Sumatera dapat lebih efektif bila adanya sanksi untuk setiap kegiatan konversi dan deforestasi yang terjadi di kawasan lindung (Gaveau *et al.* 2012). Akan tetapi, hal ini sulit terlaksana dikarenakan lemahnya peran stakeholder dan koordinasi antar pihak belum berjalan (Rosdiana 2004).

Laju deforestasi hutan di Indonesia selama periode 2010-2012 tidak kurang dari 450.000 ha/tahun (Kemenhut 2013). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pada tahun 1985 hingga 2007 telah terjadi penurunan luasan hutan sebesar 85% atau 10,2 juta ha terjadi di Sumatera (Yves *et al.* 2010). Hal lain yang mengindikasikan terjadinya kegiatan konversi hutan adalah akses legal masyarakat lokal terhadap pemanfaatan lahan dan sumberdaya hutan terbatas (Yamani 2011). Pengembangan hutan rakyat diharapkan dapat mengurangi laju deforestasi. Akan tetapi, pola pengelolaan hutan rakyat yang efektif untuk diterapkan dalam mengurangi laju deforestasi di Sumatera belum diketahui terutama pada program TFCA di Bengkulu.

Penelitian dan kajian terkait pola tanam hutan rakyat telah banyak dilakukan, Purwanto dan Achmad (2014) melakukan kajian mengenai sistem agroforestri dan kontribusi ekonomi pada berbagai pola tanam hutan rakyat. Selain itu, telah dilakukan kajian mengenai pola agroforestri di hutan rakyat penghasil kayu pertukangan (sengon) oleh Diniyanti *et al.* (2010). Hasil menunjukkan bahwa pemilihan jenis tanaman hutan rakyat sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan hutan rakyat. Akan tetapi, belum adanya penelitian atau kajian yang membahas tentang pola

pengembangan hutan rakyat pada suatu proyek atau program konservasi hutan. Sementara itu, kegiatan konservasi pada program TFCA di Bengkulu didominasi dengan skema hutan kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan hasil kajian Rosdiana (2004), pengembangan HKm melalui keproyekan masih belum efektif. Oleh karena itu, TFCA di Bengkulu melalui konsorsium ulayat mulai mengembangkan hutan rakyat untuk mendukung kegiatan konservasi hutan.

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengembangan hutan rakyat pada program TFCA di Bengkulu. Konsep yang dikaji yaitu pola pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan para petani hutan rakyat dalam suatu kelompok tani di desa yang terlibat program *Tropical Forest Conservation Action Sumatra* (TFCA-Sumatra) di Provinsi Bengkulu. Hal ini ditentukan karena program TFCA yang disebut juga aksi nyata konservasi hutan tropis Sumatera. Selain itu, tujuan program TFCA di Provinsi Bengkulu untuk penguatan dan pengembangan hutan koridor yang menghubungkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Sedangkan Sumatera mengalami deforestasi di dalam kawasan hutan periode 2003-2006 terbesar dibanding pulau-pulau besar lainnya sebesar 268 000 Ha per tahun (Kemenhut 2008). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pengembangan hutan rakyat pada program TFCA-Sumatera di Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di daerah yang terlibat pada program *Tropical Forest Conservation Action Sumatra* (TFCA-Sumatera) di Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi dari tujuh wilayah kerja TFCA-Sumatera di Bengkulu dipilih Desa Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemilihan lokasi desa penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dikarenakan desa tersebut merupakan desa yang telah menerapkan hutan rakyat pada pemanfaatan lahan dan sumberdaya hutan. Hal ini dikarenakan enam desa lainnya menerapkan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan jasa ekowisata. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu bulan Desember – Februari 2014.

Penentuan Responden

Penentuan responden dalam penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan menanyakan kepemilikan hutan rakyat yang memenuhi syarat-syarat suatu lahan sebagai hutan rakyat kepada Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH). Sedangkan jumlah responden ditentukan dengan menggunakan pendekatan Taro Yamane yang dikembangkan oleh Riduwan (2009):

$$n = N/(N.d^2 + 1)$$

Keterangan:

n = Jumlah responden (orang)

N = Jumlah petani yang tergabung dalam KTH (orang)

d = Kelonggaran ketidaktelitian (15%)

Petani yang tergabung dalam KTH (kelompok tani hutan) Bumi Sulau Lestari di Desa Air Sulau sebanyak 115 orang. Berdasarkan Taro Yamane diperoleh responden 33 orang, tetapi hanya terdapat 30 orang yang aktif dalam KTH Bumi Sulau Lestari. Oleh karena itu, dipilih responden sebanyak 35 orang dengan 30 orang merupakan petani yang aktif dalam kegiatan kelompok dan 5 orang petani yang tergabung dalam kelompok tapi tidak aktif dalam kegiatan kelompok.

Pengumpulan Data dan Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Data dan informasi melalui wawancara dikumpulkan menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan berpedoman pada daftar topik yang telah disusun sebelumnya. Data dan informasi tersebut kemudian diolah dan dianalisis.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dan memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber sekunder yaitu berbagai dokumen yang relevan (Sugiyono 2011). Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang terpilih dengan metode *purposive sampling* serta melalui observasi. Data sekunder terdiri atas berbagai dokumen yang terkait dengan pengembangan hutan rakyat pada program TFCA di Bengkulu Selatan. Data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi dokumen-dokumen terkait dari responden atau nara sumber. Studi pustaka/dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Metode Analisis Data

Analisis pola pengembangan hutan rakyat pada program TFCA di Bengkulu Selatan dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis penjelasan untuk data-data kualitatif terutama pada pola hutan rakyat yang ditentukan berdasarkan kerjasama (swadaya, subsidi, dan kemitraan). Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis penjelasan untuk data-data yang bersifat kuantitatif dengan cara tabulasi data terutama dalam menganalisis pola hutan rakyat berdasarkan jenis tanaman (monokultur, agroforestri, atau campuran).

Pola hutan rakyat yang dikembangkan pada program TFCA dilihat dari kombinasi pola berdasarkan jenis tanaman pembentukannya dan berdasarkan sumber kerjasama pengelolaannya. Pola-pola yang dikembangkan di masyarakat dari komponen tanaman pembentukannya, yaitu secara monokultur, agroforestri, dan campuran. Pola monokultur yaitu hutan rakyat yang disusun oleh satu jenis tanaman kehutanan. Pola agroforestri yaitu bentuk pemanfaatan lahan yang mengkombinasikan antara tanaman kehutanan, pertanian, dan/atau peternakan pada lahan milik yang dikelola secara terpadu (Sardjono *et al.* 2003). Sedangkan pola campuran merupakan pemanfaatan lahan pada lahan milik dengan berbagai jenis tanaman kehutanan. Sedangkan pola hutan rakyat berdasarkan bentuk kerjasamanya yaitu, pola swadaya, subsidi, dan kemitraan. Hal ini dilakukan untuk menemukan

kombinasi pengembangan hutan rakyat berdasarkan komponen tanaman pembentukannya dan bentuk kerjasamanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pengembangan Hutan Rakyat

Awal terbentuknya hutan rakyat di Desa Air Sulau dimulai setelah masa 1993-1998. Masyarakat Desa Air Sulau yang merupakan masyarakat transmigran menerima program dari dinas kehutanan yaitu program padat karya. Pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif di lahan usaha dengan menebang habis tanaman yang ada di lahan usaha dan diganti dengan tanaman karet dan pelawi. Akan tetapi, program ini gagal dan terjadi tumpang tindih lahan masyarakat yang belum selesai hingga sekarang.

Masyarakat transmigrasi di Desa Air Sulau sudah bercocok tanam sejak awal kedatangannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menanam palawija dan sayur-sayuran pada lahan hutan rakyat yang telah diusahakan sebelumnya. Hasil dari kegiatan ini digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi dijual ke desa tetangga. Selain itu, masyarakat mulai membuat sawah.

Kondisi ini cukup lama berlangsung sampai dengan adanya program *Tree Corps Smallholder Sector Project* (TCSSP) yang berupa bantuan bibit karet 500 batang pada setiap hektarnya dan biaya pengelolaan lahan pada tahun 1997. Setelah itu, masyarakat sudah mengenal kelompok-kelompok sosial seperti kelompok tani dan pembinaan koperasi.

Periode berikutnya pada masa 1999-2004 kelanjutan program TCSSP yaitu penambahan bantuan benih padi darat *varietas* cirata dan pasaman untuk tumpangsari pada tanaman karet. Pada masa ini juga terjadi alih fungsi lahan oleh masyarakat dari sawah menjadi kebun karet dan sawit.

Sejak tahun 2005-2010, mulai banyak peningkatan pendukung di bidang pertanian dengan membangun jalan sentra produksi, pendirian koperasi syariah "sulau makmur", dan adanya Gapoktan. Bantuan-bantuan dari pemerintah mulai banyak diserap oleh masyarakat terutama dibidang pertanian.

Desa Air Sulau merupakan wilayah penyangga Hutan Lindung Raja Mandara. Kawasan hutan ini termasuk dalam salah satu kawasan hutan lindung yang penting sebagai koridor ekosistem bukit barisan selatan. Akan tetapi, jumlah luas hutan ini berangsur-angsur mulai berkurang akibat maraknya penebangan hutan dan ekspansi perkebunan sawit. Ulayat didukung oleh *Konsorsium of Sumatera* mencoba membangun kesadaran itu dengan membentuk kelompok hutan rakyat untuk mempertahankan fungsi utama dari hutan agar tidak hilang. Selain itu, kelompok hutan rakyat ini melibatkan langsung peran masyarakat desa dalam menjaga hutan yang ada baik hutan rakyat yang dibentuk maupun hutan yang berbatasan langsung dengan desa. Yamani (2011) berpendapat bahwa masyarakat harus diberi hak otonom untuk mengurus hutan yang berbatasan langsung dengan wilayah desa yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah harus mendelegasikan sebagian kewenangan pengurusan hutan menjadi kewenangan pemerintah desa yang berada pada penyangga kawasan hutan.

Pola Pengembangan Hutan Rakyat

Hutan rakyat yang berkembang di lokasi penelitian memiliki ciri-ciri lokasi dengan kawasan yang terpencar, pola usaha yang berkembang tidak selalu murni berupa kayu-kayuan. Selain itu, dengan topografi tempat tumbuh yang rendah memiliki pola tanam dan jenis tanaman yang dikembangkan beragam (Purwanto dan Achmad 2014). Pola hutan rakyat yang berkembang, selain terdiri dari tanaman kayu-kayuan juga terdiri dengan berbagai tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan pakan ternak. Menurut Hardjanto (2000), perusahaan hutan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) dilakukan oleh petani, tengkulak dan industri, dimana petani masih memiliki posisi tawar yang lebih rendah, (2) petani belum dapat melakukan usaha hutan rakyat menurut prinsip usaha dan prinsip kelestarian yang baik, (3) bentuk hutan rakyat sebagian besar berupa budidaya campuran, yang diusahakan secara sederhana, (4) pendapatan dari hutan rakyat bagi petani masih diposisikan sebagai pendapatan sampingan dan bersifat insidental dengan kisaran tidak lebih dari 10% dari pendapatan total.

Menurut Darusman dan Wijayanto (2007) sistem pengelolaan hutan rakyat berdasarkan jenis tanamannya dibagi menjadi tiga pola pengelolaan, yaitu: (1) pola hutan rakyat sejenis, (2) pola hutan rakyat campuran, dan (3) pola hutan rakyat *agroforestri* yang merupakan hutan rakyat campuran antara tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, hijauan pakan ternak, yang dipadukan dengan tanaman pangan semusim seperti ubi kayu dan jagung, atau dengan tanaman obat-obatan seperti kunyit dan jahe.

Pola hutan rakyat yang dikembangkan di lokasi penelitian terdiri dari pola hutan rakyat campuran dan pola hutan rakyat *agroforestri*. Hutan rakyat campuran terdiri dari berbagai jenis tanaman kehutanan dalam satu hamparan. Sedangkan, *agroforestri* merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah akibat adanya alih guna lahan dan sekaligus untuk mengatasi masalah pangan serta mensejahterakan masyarakat (Sardjono *et al.* 2003). Purnomo dan Lestari (2013) menyatakan

bahwa sistem *agroforestri* yang dikembangkan pada hutan rakyat di Bengkulu layak dikembangkan secara finansial. Hal ini dikarenakan pola penanaman *agroforestri* yang dikembangkan di Bengkulu tidak peka terhadap perubahan harga dan volume produksi dan kebutuhan lahan yang digunakan juga minim berkisar 0.34- 1.01 ha perpetani.

Pola Hutan Rakyat Berdasarkan Struktur Tanaman Pembentuknya

Hutan rakyat di Desa Air Sulau yang termasuk dalam program TFCA-Sumatera ini dapat didefinisikan sama dengan kebun. Pengelolaan hutan rakyat di Desa Air Sulau dilakukan dalam bentuk campuran dan *agroforestry*. Jenis tanaman kayu yang diusahakan diantaranya karet, sengon, mahoni dan jabon (**Error! Reference source not found.**). Metode penanaman yang dilakukan cukup bervariasi. Sebagian besar petani mengusahakan hutan rakyat dalam bentuk campuran dengan menanam sengon dan jabon sebagai tanaman sela dan tanaman pagar pada kebun karet dan sawit. Sedangkan hutan rakyat bentuk *agroforestry* dengan pola tanam tumpangsari, dimana suatu areal lahan ditanami dengan tanaman perkebunan, buah, sayuran dan tanaman keras. Jenis tanaman yang diusahakan pada pola *agroforestry* diantaranya kacang tanah, kacang panjang, cabe, singkong, dan tanaman palawija lainnya.

Sistem *agroforestri* yang sering diterapkan pada hutan rakyat di Bengkulu merupakan istilah bentuk pemanfaatan lahan terpadu dari kehutanan, pertanian, dan atau peternakan yang ada di berbagai tempat di belahan bumi, tidak terkecuali yang dapat ditemui di Bengkulu (Sardjono *et al.* 2003). Klasifikasi sistem *agroforestri* dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai aspek sesuai dengan perspektif dan kepentingannya. Klasifikasi sistem *agroforestri* berdasarkan komponen penyusun ada tiga, yaitu (Sardjono *et al.* 2003):

1. Arisilvikultur, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan (pepohonan, perdu, palem, bambu, dll.) dengan komponen pertanian (non kayu).
2. Silvopastura, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan peternakan.
3. Agrosilvopastura, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan/hewan.



Gambar 1 Pola hutan rakyat pada program TFCA-Sumatera: (a) HR campuran (b) HR *agroforestri*

Pengklasifikasian agroforestri berdasarkan komponen penyusunnya dilakukan untuk mempermudah menemukan pola agroforestri yang sesuai pada suatu daerah dengan kondisi suatu daerah yang berbeda-beda dengan daerah lain. Semua sistem agroforestri berdasarkan sistem penyusunnya layak dilaksanakan baik itu agrisilvikultur, silvopastura, maupun agrosilvopastura. Hutan rakyat dengan sistem agroforestri di lokasi penelitian didominasi oleh hutan rakyat agroforestri dengan tipe agrosilvopastura.

Selain bentuk hutan rakyat agroforestri, hutan rakyat campuran merupakan bentuk pengembangan hutan rakyat di lokasi penelitian. Jenis tanaman keras yang diusahakan merupakan kayu lokal dan terdapat tanaman sengon yang baru dikembangkan.

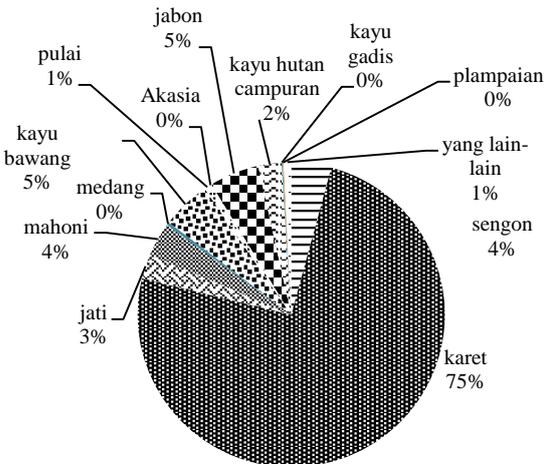
Umur pengelolaan lahan hutan di Desa Air Sulau ini hampir 20 tahun sedangkan umur pengelolaan Sengon baru berumur tiga tahun dengan keliling pohon masih relatif kecil berkisar antara 20 – 40 cm. Sehingga dari segi finansial petani belum memperoleh pendapatan dari penjualan tanaman Sengon ini. Umur produktif daur dari hutan sengon sekitar 5 – 7 tahun sudah masak tebang dan bisa dipakai untuk bahan baku kayu pertukangan maupun bangunan, sedangkan pada umur kurang lebih 3 tahun sangat baik digunakan sebagai bahan baku pulp dan kertas.

Para petani sebagian besar memiliki lahan pertanian atau peternakan yang dikelola secara terpisah di luar kawasan hutan rakyat atau bekerja di luar sektor kehutanan dan pertanian (misalnya : pedagang, pegawai negeri, buruh pabrik dan lain-lain) untuk menambah sumber pendapatan selain dari sektor kehutanan. Hal ini disebabkan tanaman kehutanan memiliki daur produksi yang cukup lama yaitu berkisar antara 5 – 7 tahun dan ini merupakan tabungan jangka panjang yang diharapkan diperoleh oleh masyarakat.

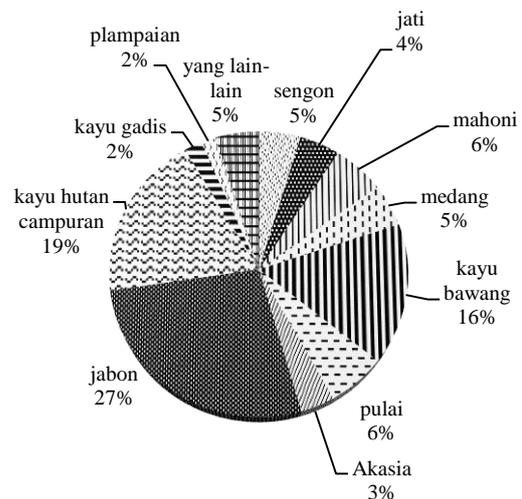
Jenis tanaman keras yang dikembangkan oleh masyarakat di Desa Air Sulau didominasi oleh tanaman karet. Hal ini dikarenakan pada tahun 1997 ada bantuan bibit karet dari dinas perkebunan. Selain bibit, petani mendapat bantuan pupuk, alat pertanian dan pinjaman dana. Dikarenakan adanya pengembalian dana dengan sistem kredit, masyarakat lebih termotivasi untuk mengembangkan kebun karet agar memperoleh pendapatan lebih. Selain itu, didukung oleh adanya intensitas pelatihan/informasi dan tersedianya pasar. Hal ini menurut Hardjanto (2003) bahwa adanya bantuan bibit dari pemerintah, adanya perhatian dari pemerintah dan didukung permintaan pasar merupakan faktor eksternal yang merupakan peluang dalam usaha pengembangan hutan rakyat.

Tanaman keras selain karet (*Hevea brasiliensis*), yang dikembangkan pada lahan hutan rakyat petani didominasi oleh jabon (*Anthocephalus cadamba*), jati (*Tectona grandis*), pulai (*Alstonia scholaris*), akasia (*Acacia mangium*), kayu gadis (*Cinnamomum parthenoxylon*), dan kayu hutan campuran lainnya (seperti kayu afrika, bayur dan terembesi) (Gambar 3). Selain itu, terdapat juga mahoni (*Swietenia macrophylla*), medang (*Litsea amara Blume*), kayu bawang (*Protium javanicum*), sengon (*Paraserianthes falcataria*). Berbagai tanaman keras ini dikembangkan pada lahan hutan rakyat campuran yang disebut kebun.

Hasil dari hutan rakyat ini sebagian besar digunakan untuk dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti perbaikan bangunan rumah.



Gambar 2 Sebaran Jenis Tanaman Keras yang dibudidayakan



Gambar 3 Sebaran Jenis Tanaman yang dibudidayakan pada HR selain Karet

Hasil yang dikelola di luar hutan rakyat umumnya untuk dikonsumsi sendiri (subsisten) sedangkan hasil dari tanaman tahunan umumnya dijual ke pasar (komersial) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari segi ekonomi, tanaman tahunan seperti karet yang sudah berumur lebih dari 3 tahun sudah dapat dipanen dan dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, masyarakat di Desa Air Sulau juga memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah dengan menanam tanaman semusim seperti palawija, bumbu, dan tanaman buah-buahan serta tanaman berkayu/pohon meskipun dalam jumlah sedikit.

Pola Hutan Rakyat Berdasarkan Bentuk Kerjasama

Pola hutan rakyat yang dikembangkan pada program TFCA-Sumatera di Bengkulu Selatan dilihat dari bentuk kerjasama dengan sumber modal yang diperoleh terdiri dari biaya mandiri (swadaya), bantuan penuh berupa bibit, pupuk, pendampingan dari program TFCA-Sumatera (subsidi penuh), serta bantuan bibit, pupuk,

peralatan pertanian, dan dana yang harus dikembalikan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (subsidi pinjaman). Pola hutan rakyat yang dilihat dari bentuk kerjasama dikombinasikan dengan pola hutan rakyat menurut tanaman pembentukannya pada Tabel 1.

Tabel 1 Pola Hutan Rakyat yang dikembangkan

Pola Hutan Rakyat	Campuran		Agroforest		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%
Swadaya	12	75.0	4	25.0	16	100.0
Subsidi penuh	7	77.8	2	22.2	9	100.0
Subsidi pinjaman	6	60.0	4	40.0	10	100.0
Jumlah	25	71.4	10	28.6	35	100.0

Tabel 1 menunjukkan bahwa pola hutan rakyat yang dikembangkan didominasi oleh pola hutan rakyat dengan sumber dana dari subsidi penuh dan pembentukan tanaman dengan pola campuran. Sedangkan pola tanam *agroforestry* banyak diusahakan pada petani dengan sumber modal subsidi pinjaman. Hutan rakyat *agroforestri* yang diusahakan dengan sumber modal subsidi pinjaman ini dilakukan oleh petani yang sebagian besar mengusahakan tanaman karet. Hal ini dilakukan untuk dapat mengembalikan modal yang telah dipinjam para petani dengan memanfaatkan sela tanaman. Sedangkan pada pola campuran dengan tanaman karet, para petani lebih banyak menggunakan sumber modal dengan subsidi penuh. Oleh karena itu para petani biasanya akan menggunakan jenis tanaman yang lebih beragam.

Kondisi yang hampir sama dengan hutan rakyat hasil binaan instansi pemerintah di Desa Kayu Ajaran yang disebut juga dengan kebun. Bentuk pengelolaan hutan rakyat di Desa Kayu Ajaran dilakukan dalam bentuk hutan rakyat campuran dan *agroforestry*. Jenis tanaman kayu yang diusahakan adalah sengon, karet, kayu bawang, mahoni dan jati. Sama halnya dengan petani di Desa Air Sulau, petani di Desa Kayu Ajaran juga mengusahakan hutan rakyat dalam bentuk campuran dengan menanam sengon, mahoni dan jati sebagai tanaman sela pada kebun karet dan sawit yang diusahakan. Sedangkan hutan rakyat *agroforestry* dengan pola tanam tumpangsari dan jenis tanaman yang diusahakan diantaranya jagung, singkong, kacang tanah, kedelai, jahe merah dan buah-buahan seperti duren, pinang, pisang, kopi dan jengkol.

KESIMPULAN

Pola pengembangan hutan rakyat pada program TFCA di Bengkulu adalah hutan rakyat campuran dan *agroforestry* dengan didominasi jenis tanaman perkebunan seperti karet. Tanaman berkayu seperti sengon baru dikembangkan pada usaha hutan rakyat di Bengkulu yang dipadukan dengan tanaman pangan semusim seperti ubi kayu dan jagung, atau dengan tanaman obat-obatan seperti kunyit dan jahe.

Berdasarkan sumber dananya, pola hutan rakyat pada program TFCA-Sumatera di Bengkulu termasuk ke dalam pola hutan rakyat dengan subsidi penuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian. Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Komisi Pembimbing Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan Fakultas Kehutanan IPB (Prof. Hardjanto dan Dr. Yulius Hero).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin HS, Munandar A, Schultin KG, Kaswanto RL. 2012. The role and impacts of small-scale, homestead agro-forestry systems (“pekarangan”) on household prosperity: an analysis of agro-ecological zones of Java, Indonesia. *International Journal of AgriScience*. 2(10): 896 – 914.
- Darusman D, Wijayanto N. 2007. Aspek Ekonomi Hutan Rakyat (skim pendanaan) [Makalah]. Studium General dalam Pekan Hutan Rakyat II di Balai Penelitian Kehutanan Ciamis, 30 Oktober 2007.
- Diniyati D, Fauziyah E, Sulistyati WT, Suyarno, Mulyati E. 2010. Pola Agroforestri Di Hutan Rakyat Penghasil Kayu Pertukangan (sengon). Pengelolaan hutan Tanaman Penghasil Kayu Pertukangan. Balai Penelitian Kehutanan Ciamis [Laporan Hasil Penelitian]. Ciamis (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan.
- Gaveau DLA, Hagnyo W, Firman S. 2007. Three decades of deforestation in southwest Sumatra: Have protected areas halted forest loss and logging, and promoted re-growth?. *Biological Conservation*. 134(4): 495–504. Doi: 10.1016/j.biocon.2006.08.035.
- Gaveau DLA, Epting J, Lyne O, Linkie M, Kumara I, Kanninen M, Leader-Williams N. 2009. Evaluating whether protected areas reduce tropical deforestation in Sumatra. *Journal of Biogeography*. 36 (11): 2165–2175. Doi:10.1111/j.1365-2699.2009.02147.x.
- Gaveau DLA, Curran LM, Paoli GD, Carlson KM, Wells P, Besse-Rimba A, Ratnasari D, Leader-Williams N. 2012. Examining protected area effectiveness in Sumatra: importance of regulations governing unprotected lands. *Conservation Letters*. 5(2): 142–148. Doi: 10.1111/j.1755-263X.2011.00220.x.
- Geist HJ, Lambin EF. 2002. Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation. *BioScience*. 52 (2): 143-150. Doi: 10.1641 / 0006-3568 (2002) 052 [0143: PCAUDF] 2.0.CO; 2
- Hardjanto. 2000. Beberapa Ciri Pengusahaan Hutan Rakyat di Jawa. Suharjito, Editor. *Hutan Rakyat di Jawa Peranannya dalam Perekonomian Desa*. Bogor. P3KM

- Hardjanto. 2003. Keragaan dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau Jawa [Disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2008. Statistik Kehutanan Indonesia 2008. Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan.
- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2013. Statistik Kehutanan Indonesia 2012. Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan.
- Maryudi A, Devkota RR, Schusser C, Yufanyi C, Rotchanaphatharawit R, Salla M, Aurenhammer H. 2012. Back to Basic-Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics* [Internet]. (tanggal diperbaharui, 2012 Jan [diunduh 2014 March 29]; 14(1): 1–5. Tersedia pada: <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017>.
- Martini E, Roshetko JM, Noordwijk MV, Rahmanulloh A, Mulyoutami E, Joshi L, Budidarsono S. 2012. Sugar palm (*Arenga pinnata* (Wurmb) Merr.) for livelihood and biodiversity conservation. *Agroforestry Systems*. 86(3): 401–417. Doi: 10.1007/s10457-011-9441-0.
- Minang PA, McCall MK, Bressers HTA. 2007. Community capacity for implementing clean development mechanism projects within community forests in Cameroon. *Environ Manage*. 39: 615–630. Doi: 10.1007/s00267-005-0275-2.
- Purnomo BT, Lestari S. 2013. Analisis finansial agroforestri kayu bawang (*Dysoxylum mollissimum* Blume) dan kebutuhan lahan minimum di provinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*. 10(4) : 211-223.
- Purwanto RH, Achmad B. 2014. Peluang adopsi sistem agroforestri dan kontribusi ekonomi pada berbagai pola tanam hutan rakyat di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Bumi Lestari*. 14 (1): 15–26
- Riduwan. 2009. *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Rosdiana E. 2004. Efektivitas proyek OECF (JBIC) dalam pengembangan hutan kemasyarakatan (HKM). *Jurnal Kehutanan Masyarakat*. 2(2): 36–53.
- Sardjono MA, Djogo T, Arifin HS, Wijayanto N. 2003. *Klasifikasi dan Pola Kombinasi Komponen Agroforestri*. Bogor (ID): ICRAF.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Taylor PL. 2010. Conservation, community, and culture? New organizational challenges of community forest concessions in the Maya Biosphere Reserve of Guatemala. *Journal of Rural Studies*. 26: 173–184.
- [TFCA] Tropical Forest Conservation Action For Sumatera. 2014. Rencana Strategis 2010-2015. Jakarta (ID): TFCA. [diunduh 2014 Okt 1]. Tersedia pada: <http://tfcasumatera.org/wp-content/uploads/2014/01/Renstra-TFCA-Sumatera-2010-2015-Ina.pdf>.
- Tiwari BK, Tynsong H, Lyncer MB. 2010. Forest management practices of the tribal people of meghalaya, north-east india. *Journal of Tropical Forest Science*. 22(3):329-342.
- Uriarte M, Schneider L, Rudel TK. 2010. Synthesis: Land Transitions in the Tropics. *Biotropica*. 42(1): 59–62. Doi : 10.1111/j.1744-7429.2009.00583.x.
- Yamani M. 2011. Strategi perlindungan hutan berbasis hukum lokal di enam komunitas adat daerah Bengkulu. *Jurnal Hukum*. 2:175-192.
- Yves L, Yumiko U, Michael S, Arif B, Budi S, Oki H. 2010. Eco-floristic sectors and deforestation threats in Sumatra: identifying new conservation area network priorities for ecosystem-based land use planning. *Biodiversity & Conservation*. 19 (4):1153-1174. DOI: 10.1007/s10531-010-9784-2.